

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Model Bisnis Perusahaan Freight Forwarding

Perusahaan *freight forwarding* adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa terkait pengurusan barang dari dalam negeri untuk dikirim ke luar negeri atau pengurusan barang masuk dari luar negeri. Sehingga pada praktiknya kegiatan dari perusahaan ini tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor. Secara sederhana, *freight forwarding* adalah jasa pengurusan transportasi untuk penerimaan dan pengiriman barang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015, jasa *freight forwarding* adalah suatu aktivitas bisnis yang bertujuan untuk mewakili kepentingan pemilik perusahaan untuk mengurus suatu kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, sortasi, penyimpanan, penandaan, pengepakan, penimbangan, pengukuran, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan dan penyelesaian dokumen, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh pelanggan ataupun pihak yang berhak menerima barang tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut usaha ini dibagi menjadi empat segmen, antara lain:

- Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, yaitu badan usaha yang mengurus pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa pihak importir atau eksportir.
- Jasa pengurusan transportasi murni, yaitu jasa yang berkaitan dengan pengiriman barang ke berbagai tujuan baik dalam maupun luar negeri dari tempat pengirim sampai pelabuhan atau bandara tergantung pada sifat barang dan tujuan pengiriman.
- *Trucking*, yaitu jasa pengurusan transportasi melalui darat dengan menggunakan truk.
- Pergudangan, yaitu jasa pengurusan transportasi yang melayani klien dalam penyimpanan barang yang dari muatan kapal sebelum didistribusikan ke penerima.

Adapun sumber pendapatan perusahaan *freight forwarding* utamanya yaitu berasal dari pemberian jasa pelayanan terkait pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dalam rangka kegiatan ekspor ataupun impor. Dalam menjalankan proses bisnisnya perusahaan ini juga harus mengeluarkan suatu biaya yang selanjutnya biaya tersebut akan diakumulasi sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan tagihan kepada pelanggan. Biaya-biaya tersebut diantaranya adalah biaya gaji dan karyawan, biaya suku cadang dan reparasi, biaya keamanan, biaya kecelakaan kendaraan dan

tilang, biaya alat tulis dan formulir, biaya keagenan, biaya penyusutan kendaraan truk, biaya operasional kendaraan, serta biaya pajak PPH 21. Dalam praktiknya perusahaan *freight forwarding* akan menyelesaikan jasanya terlebih dahulu yang selanjutnya akan dilakukan tagihan kepada pelanggan untuk semua jasa yang telah diberikan. Selanjutnya pelanggan dapat membayar tagihan atas jasa tersebut dengan cara tunai ataupun dengan kredit.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian landasan teori, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang berjudul “*Tinjauan atas Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban pada PT ABC Berdasarkan SAK-ETAP*” Beberapa penelitian terdahulu yang mengarah pada judul penelitian ini, di antaranya yakni penelitian oleh Jusmani (2013), tujuan penelitiannya yaitu untuk mencari kebenaran terkait dampak dari koreksi kesalahan pada laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pencatatan akuntansi pada laporan keuangan terutama pada pos pendapatan dan beban terkadang tidak menjadi benar dengan sendirinya sehingga hal ini akan berdampak pada neraca atau laporan laba rugi milik perusahaan sehingga diperlukan adanya jurnal koreksi. Dalam makalah ini, penulis menunjukkan bahwa temuan tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam pengklasifikasian beban yang seharusnya tidak menjadi beban perusahaan namun dibebankan kepada perusahaan.

Berdasarkan penelitian oleh Yuliana (2014), tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan penyajian pos pendapatan dan beban pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, kemudian menganalisis data dan menginterpretasikan data, serta dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data tersebut. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesalahan penyajian pada akun pendapatan dan beban pada laporan laba rugi perusahaan sehingga hal ini akan berdampak juga ke neraca. Kesalahan pengakuan pada pendapatan disebabkan karena perusahaan tidak menyajikan pendapatan keseluruhan yang didapatkan dari hasil bisnisnya sehingga hal ini akan berdampak pada laba bersih pada laporan laba rugi. Selain itu berdasarkan penelitian tersebut juga ditemukan kesalahan dalam penyajian beban sehingga beban menjadi lebih kecil dan berdampak pada meningkatnya laba bersih yang diakui oleh perusahaan.

Di samping penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arsani (2013), Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari kesalahan penyajian pada pendapatan dan beban pada laporan keuangan. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa pendapatan yang disajikan oleh KSP Duta Sejahtera belum sesuai dengan kaidah SAK-ETAP karena sehingga terdapat selisih pada jumlah pendapatan yang seharusnya dicatat namun tidak dicatat oleh entitas tersebut sehingga pendapatan yang disajikan didalam laporan

keuangan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Tentunya hal ini juga akan berdampak pada sisa hasil usaha yang dibagikan.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI:2015) pengertian dari laporan keuangan adalah suatu catatan atau laporan tertulis yang menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu perusahaan yang berkaitan dengan suatu kegiatan baik kegiatan operasional maupun kegiatan non operasional. Dengan kata lain pengertian dari laporan keuangan secara umum adalah laporan yang menyajikan catatan atau informasi mengenai proses bisnis suatu perusahaan baik itu berupa pembelian, penjualan, maupun transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

2.3.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1, adapun lima jenis laporan keuangan yang wajib disiapkan oleh perusahaan yaitu:

- a. Laporan Laba Rugi (*income statement*), merupakan laporan keuangan yang menjadi tolak ukur kinerja keuangan suatu perusahaan karena pada laporan laba rugi dapat diketahui bagaimana suatu perusahaan dapat menghasilkan profit. Sesuai namanya terdapat tiga komponen pada laporan laba rugi perusahaan yaitu pendapatan, beban, dan keuntungan ataupun kerugian;
- b. Neraca (*statement of financial position*), dapat disebut juga sebagai laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, maupun ekuitas atas suatu perusahaan dalam suatu periode;

- c. Laporan Perubahan Ekuitas (*statement of change of equity*), merupakan laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal pada perusahaan. Dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Laporan perubahan modal dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya.
- d. Laporan Arus Kas (*statement of cash flow*), merupakan laporan yang menunjukkan informasi mengenai aliran masuk ataupun aliran keluar kas. Laporan arus kas terbagi menjadi tiga aktivitas yakni berasal dari aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Aktivitas operasional yaitu kegiatan yang berkaitan dengan jalannya bisnis sehari-hari suatu perusahaan seperti penjualan, pembelian, dan yang lainnya. Aktivitas investasi berasal dari penjualan ataupun pembelian yang melibatkan aset tetap. Sedangkan pada aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang berhubungan dengan adanya penambahan atau penyetoran modal suatu perusahaan.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan catatan yang berisi informasi mengenai penjelasan terkait laporan neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, maupun laporan arus kas secara lebih detail dan terinci. Catatan ini perlu disusun agar pengguna laporan keuangan mempunyai pemahaman yang lebih baik dan mendalam mengenai pos-pos akun yang berkaitan dengan laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan tersebut.

2.4 Pendapatan

2.4.1 Definisi Pendapatan

Definisi pendapatan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 23 tentang pendapatan yaitu pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) definisi dari pendapatan yaitu pendapatan adalah penghasilan yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas operasional perusahaan dengan jenis yang berbeda contohnya adalah penjualan, imbalan, bunga, dividen, sewa, dan royalti. Lalu menurut Donald E. Kieso, pendapatan merupakan kenaikan aktiva atas suatu entitas bisnis. Kenaikan aktiva bisa disebabkan oleh penjualan atau produksi barang, pemberian jasa kepada pelanggan, atau kegiatan operasional lainnya yang menyebabkan timbulnya laba yang bersifat berkelanjutan dalam suatu periode akuntansi.

Secara umum definisi dari pendapatan dalam akuntansi adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Bagi perusahaan pendapatan merupakan aliran masuk aktiva atau pengurangan utang perusahaan yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa.

2.4.2 Klasifikasi Pendapatan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik kategori dari pendapatan yaitu pada Bab 20 paragraf 20.1, dijelaskan bahwa pendapatan suatu entitas muncul sebagai akibat dari adanya suatu transaksi yaitu:

- a. Penjualan barang (baik diproduksi sendiri oleh entitas (perusahaan manufaktur) atau dibeli untuk dijual kembali (perusahaan dagang));
- b. Pemberian jasa pada pelanggan;
- c. Penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain yang dapat menyebabkan timbulnya bunga, royalti, atau dividen;
- d. Kontrak konstruksi.

Selanjutnya pada bab 20 paragraf 20.2 Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa transaksi dan kejadian lain yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian sewa;
- b. Dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas;
- c. Perubahan nilai wajar investasi pada efek tertentu, atau pelepasannya.

2.4.3 Pengukuran pendapatan

Berdasarkan SAK-ETAP paragraf 2.20 dijelaskan bahwa pengertian dari pengukuran yaitu *“proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu”*. Selanjutnya pada SAK-ETAP paragraf 2.31 menjelaskan

mengenai dasar pengukuran yang umum yakni berdasarkan pada nilai wajar dan nilai historis. Dalam paragraf 20.3 juga menyatakan bahwa suatu entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

Disamping itu pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto juga harus dimasukkan oleh entitas dalam pengukuran pendapatan. Nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak atas barang dan jasa, pajak penjualan, ataupun pajak pertambahan nilai harus dikeluarkan oleh entitas. Apabila terdapat hubungan keagenan dengan pihak lain, entitas hanya boleh memasukkan dalam pendapatan hanya terbatas pada jumlah komisi. Jumlah pendapatan yang diperoleh atas nama pihak prinsipal tidak boleh dimasukkan kedalam pendapatan pada entitas tersebut.

2.4.4 Pengakuan pendapatan

Setelah pengukuran pendapatan dilakukan dengan benar selanjutnya masuk ke pengakuan pendapatan. Pada SAK-ETAP paragraf 20.7 dijelaskan bahwa entitas umumnya menerapkan kriteria pengakuan pendapatan secara terpisah untuk setiap transaksi. Namun, entitas dapat menerapkan kriteria pengakuan yang berbeda pada tiap komponen yang dapat diidentifikasi dari suatu transaksi tunggal jika hal ini diperlukan untuk merefleksikan substansi dari transaksi. Misalnya, entitas menerapkan kriteria pengakuan kepada tiap komponen yang dapat diidentifikasi dari

suatu transaksi tunggal ketika harga jual suatu produk meliputi jumlah yang dapat diidentifikasi atas pemberian jasa lanjutan. Sebaliknya, entitas menerapkan kriteria pengakuan pada dua transaksi atau lebih secara bersama-sama ketika keduanya terhubungkan sehingga efek komersial tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada rangkaian transaksi secara keseluruhan. Misalnya, entitas menerapkan kriteria pengakuan pada dua transaksi atau lebih ketika entitas tersebut menjual barang dan pada saat yang sama membuat perjanjian yang terpisah untuk pembelian kembali barang pada periode selanjutnya, maka hal tersebut meniadakan efek substantif dari transaksi.

2.5 Beban

2.5.1 Definisi Beban

Berdasarkan SAK ETAP (2009) definisi dari beban yaitu penurunan manfaat ekonomi yang ditandai dengan adanya arus keluar dari penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan turunnya ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal selama suatu periode pelaporan.

Beban dikategorikan menjadi dua yaitu beban yang timbul karena kerugian dan beban yang berasal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Beban operasional perusahaan biasanya terdiri dari beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan serta ditandai dengan berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Sedangkan kerugian itu lebih mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban

baik yang timbul maupun tidak timbul dari kegiatan operasional perusahaan, penyajiannya biasanya dipisahkan dengan beban operasional perusahaan (SAK ETAP, 2009).

2.5.2 Pengakuan Beban

SAK ETAP (2009) mengatur bahwa beban akan diakui dalam laporan laba rugi apabila terdapat penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan besarnya dapat diukur secara andal. Pengakuan beban tersebut merupakan dampak langsung dari pengakuan aset dan kewajiban perusahaan. Kemudian beban juga akan diakui ketika seluruh kriteria pengakuan pos-pos laporan keuangan yang dibahas pada subbab pengakuan pendapatan telah terpenuhi.

Berdasarkan (SAK, 2007, dikutip dalam Lumingkewas, 2013), beban harus segera diakui dalam laporan laba rugi apabila memenuhi beberapa kondisi berikut:

- a. Biaya yang timbul berhubungan langsung dengan pos penghasilan yang diperoleh;
- b. Apabila biaya yang dikeluarkan tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau tidak memenuhi syarat, maka diakui sebagai aset dalam neraca;
- c. Prosedur alokasinya rasional dan sistematis;
- d. Pengakuan beban terjadi apabila ada pengakuan aset.

Menurut (Ratunuman, 2013) pengakuan beban berdasarkan penerapan *matching concept*, beban harus diakui dalam periode yang sama

dengan pengakuan pendapatan, sehingga pengakuan beban bergantung pada pengakuan pendapatannya. Ketika pengakuan pendapatan ditunda, maka pengakuan beban yang bersangkutan juga akan ditunda. Terkait periode pengakuan beban, ada sebagian beban yang harus langsung diakui dalam periode yang sama dengan pengakuan pendapatan yang bersangkutan. Namun, ada juga beban-beban lainnya yang tidak dapat diakui pada periode berjalan, yaitu beban yang terkait dengan pendapatan di masa yang akan datang. Beban tersebut harus dikapitalisasi atau diakui sebagai aset terlebih dahulu. Selain itu, ada juga beban lainnya yang tidak terkait dengan pendapatan tertentu dan akan diakui pada periode ketika beban tersebut dibayarkan atau telah terjadi.

2.5.3 Pengukuran Beban

Pengukuran adalah suatu proses penetapan besaran uang yang digunakan untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban oleh perusahaan dalam laporan keuangan (SAK ETAP, 2009). Menurut (SAK ETAP, 2009), pengukuran baik pendapatan, beban, maupun pos-pos laporan keuangan lainnya secara umum biasanya sama, yaitu biaya historis dan nilai wajar.

- a. Biaya historis adalah ketika aset yang diperoleh diukur sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran pada saat perolehan dan kewajiban diukur sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban.

- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk menukarkan aset atau menyelesaikan kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.